

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, di berbagai belahan dunia isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) tengah hangat diperbincangkan. Perhatian khusus terhadap literasi keuangan di akibatkan oleh keinginan sebuah negara untuk memiliki penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, sehingga akan berdampak pada perbaikan roda ekonomi negara itu sendiri.

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell, 2007). Literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan perencanaan keuangan adalah tentang cara menjalani hidup hari ini yang sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan dan sementara itu mempersiapkan masa depan yang sejahtera. Ketidakhahaman akan pentingnya literasi keuangan dapat mengakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan sehingga mudah dipengaruhi oleh penjual produk keuangan, hal tersebut tentunya dapat menghambat dalam pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013 ([www.sikapuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapuangmu.ojk.go.id)),

diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* hanya sebesar 21,8% *sufficient literate* sebesar 75,69% *less literate* sebesar 2,06% dan *not literate* sebesar 0,14%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 59,7%.

**TABEL 1.1.**  
Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia, 2013

Indeks Literasi Keuangan	%
<i>Well Literate</i>	21,84
<i>Sufficient Literate</i>	75,69
<i>Less Literate</i>	2,06
<i>Not Literate</i>	0,41
	100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2013

Sedangkan, menurut laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) menyebutkan hanya 32% dari penduduk Indonesia memiliki akses yang baik terhadap lembaga keuangan informal. Jumlah ini di anggap cukup rendah jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia keseluruhan. Namun sebaliknya, 49% masyarakat Indonesia telah termasuk ke dalam kelompok yang memiliki akses yang tinggi terhadap lembaga keuangan, yang artinya hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik terutama dalam sektor perbankan. Hasil ini masih tergolong rendah jika di bandingkan dengan negara Asia lain. Malaysia misalnya, 65% dari total penduduknya telah memiliki pemahaman perbankan yang baik dan hanya 35% yang termasuk dalam kelompok dengan akses yang tinggi terhadap perbankan. Selain itu hampir 100% penduduk dari Malaysia dan Thailand memiliki

akun di bank, sementara Indonesia hanya memiliki 41%. Sementara tingkat akses perbankan di negara Asia lainnya secara berturut-turut adalah India 55%, China 65%, Filipina 75%, dan Pakistan 85% (Muat, Miftah & Wulandari, 2014).

Berdasarkan angka indeks tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, kemudian kurang dari separuh masyarakat Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mulai dari usia dini hingga dewasa, salah satu cara yaitu melalui pendidikan keuangan (*financial education*). Pendidikan keuangan adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani (Nababan & Sadalia, 2011: 2).

Pendidikan keuangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia, meskipun dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai upaya peningkatan literasi keuangan anak sejak dini. Akan tetapi upaya tersebut masih kurang dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Adapun negara-negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberikan pendidikan keuangan kepada masyarakatnya terutama mahasiswa dengan harapan literasi keuangan masyarakat semakin meningkat yaitu Amerika Serikat,

Kanada, Jepang dan Australia (Darman Nababan & Isfenti Sadalia, 2011: 2).

Pemahaman akan literasi keuangan sangat di perlukan bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Di Indonesia UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa yang tidak bisa di kesampingkan, hal ini dikarenakan UMKM memiliki daya tahan yang lebih dibanding dengan jenis usaha lainnya. Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 hingga krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap *survive* dalam menghadapi perubahan dunia. Perkembangan data UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 1.2.**  
Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia  
Tahun 2012-2013

No	Indikator	Tahun 2012	Tahun 2013	Perkemabangan Tahun 2012-2013	(%)
1	Unit Usaha	56.534.592	57.895.721	1.361.129	2,41
	Usaha Mikro Kecil & Menengah	56.534.592	57.895.721	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro	55.856.176	57.189.393	1.133.217	2,39
	- Usaha Kecil	629.418	654.222	24.803	3,94
	- Usaha Menengah	48.997	5.066	3.110	6,35
2	Tenaga Kerja	107.657.509	114.144.082	6.873.090	6,03
	Usaha Mikro Kecil & Menengah	107.657.509	114.144.082	6.873.090	6,03
	- Usaha Mikro	99.859.517	104.624.466	4.764.949	4,77
	- Usaha Kecil	4.535.970	5.570.231	1.034.262	22,8
	- Usaha Menengah	3.262.023	3.949.385	687.363	21,8

Sumber: Departemen Koperasi

Berdasarkan data Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012 sebesar

56.534.592 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 107.657.509 orang. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia sebesar 57.895.721 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2012-2013 sebesar 2,41% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,03%. Dengan data di atas bisa dipastikan bahwa jumlah pelaku ekonomi ikut meningkat. Akan tetapi peningkatan jumlah UMKM yang signifikan ini tidak didukung dengan kualitas pendidikan dan pengetahuan akan pengelolaan keuangan, sehingga masih banyak UMKM yang kurang produktif dikarenakan rendahnya pengetahuan akan keuangan. Para pelaku UMKM seharusnya wajib untuk mengerti tentang bagaimana pengelolaan dan perencanaan keuangan sehingga bermanfaat dalam mengembangkan usahanya, oleh karena itu literasi keuangan sebenarnya harga mati yang harus dipahami pelaku UMKM agar pengambilan keputusan keuangan dapat dilakukan secara bijaksana (Cahyono, 2012). Maka peneliti perlu melakukan penelitian tentang analisis tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM, adapun UMKM yang akan dilakukan penelitian yaitu UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang identik dengan kebudayaan, kerajinan dan sering dijuluki sebagai kota pelajar ini memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak, produk yang dihasilkan oleh UMKM di DIY memiliki ciri khas yang tersendiri, hal ini disebabkan oleh kebudayaan yang masih sangat kental. Adapun klasifikasi data UMKM di

DIY meliputi kerajinan dan umum, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, pengelolaan pangan, sandang dan kulit. Sedangkan varian produk ekspor andalan di DIY merupakan produk olahan kulit, tekstil dan kayu, akan tetapi pakaian jadi tekstil dan mebel kayu mempunyai nilai ekspor tertinggi di bandingkan dengan varian lainnya.

**TABEL 1.3.**  
Jumlah Unit UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2009-2013

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390
Jumlah		164.847	182.232	201.975	203.995	205.210

Sumber: Disperindagkop dan UMKM DIY

Dilihat dari tabel di atas bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2013 jumlah unit UMKM di DIY semakin meningkat, hal ini dibuktikan pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan jumlah UMKM tertinggi sebesar 19.743 unit sedangkan peningkatan jumlah UMKM yang terendah terjadi pada tahun 2012-2013 yang hanya sebesar 984 unit.

Peningkatan jumlah UMKM selama kurun waktu 2009-2013 ini diharapkan mampu menopang perekonomian daerah. Akan tetapi peningkatan yang luar biasa ini kurang didukung dengan pengetahuan akan keuangan sehingga banyak UMKM yang ada dirasakan kurang

maksimal karena rendahnya pengetahuan mengenai keuangan. Selain itu banyaknya UMKM yang sering melupakan pentingnya melakukan perencanaan keuangan dan pencatatan berupa laporan keuangan, pemasaran, kegiatan operasi dan transaksi menyebabkan pada perkembangan UMKM berjalan kurang baik. Dengan alasan tersebut maka hendaknya pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sehingga mampu memahami pentingnya pengelolaan keuangan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai pentingnya pemahaman akan literasi keuangan yang harus di miliki seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya para pelaku usaha seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat literasi keuangan (*financial lteracy*) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan judul **“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA“**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dituliskan di atas, telah di dapatkan beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Untuk menganalisis tingkat Literasi Keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah IstimewaYogyakarta.

- b. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin?
- c. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kategori Usaha?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat Literasi Keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.
- c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat Literasi Keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kategori Usaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Pelaku UMKM, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman akan keuangan atau melek finansial.
- b. Pemerintah dan perbankan, sebagai referensi agar dapat membantu penyediaan modal bagi UMKM.

- c. Peneliti, sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya.